

Perubahan Dunia dan Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Zulkifli Abdurrahman Usman

Universitas Samudra, Langsa, Aceh, Indonesia
 zulkifli82@unsam.ac.id

Abstrak The establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in the mid-20th century cannot be understood only as the result of the national struggle that took place in the archipelago. The birth of Indonesia is part of a long, complex, and interconnected world history process, which lasted for centuries. This article aims to uncover the relationship between changes in the structure of the world's political, economic, technological, thought, and international relations since the collapse of the Western Roman Empire in the 5th century to the formation of the sovereign Indonesian state. The study is conducted with a historical approach and a global historical perspective, placing changes in Europe, the Middle East, Asia, and the archipelago as part of a series of transformations that affect each other. The main argument of this article is that the historical relationship from the fall of Rome to the birth of the Republic of Indonesia is not a direct cause-and-effect relationship, but a historical relationship formed through a number of transformation chains. The Republic of Indonesia is the result of the interaction between world changes and the political actions of the Indonesian people themselves. Global history provides structure and opportunities, but the Indonesian nation through organization, ideology, diplomacy, and struggle determines the direction of this change.

Keyword global history, Roman, colonialism, capitalism, nationalism, Nusantara, Dutch East Indies, Japan, Proclamation, Republic of Indonesia.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).



Abstrak Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada pertengahan abad ke-20 tidak dapat dipahami hanya sebagai hasil perjuangan nasional yang berlangsung di wilayah kepulauan Nusantara. Lahirnya Indonesia merupakan bagian dari proses sejarah dunia yang panjang, kompleks, dan saling berhubungan, yang berlangsung selama berabad-abad. Artikel ini bertujuan mengungkap keterkaitan antara perubahan struktur politik, ekonomi, teknologi, pemikiran, dan hubungan internasional dunia sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 hingga terbentuknya negara Indonesia yang berdaulat. Kajian dilakukan dengan pendekatan sejarah dan perspektif sejarah global, dengan menempatkan perubahan di Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Nusantara sebagai bagian dari satu rangkaian transformasi yang saling memengaruhi. Argumen utama artikel ini adalah bahwa hubungan sejarah dari keruntuhan Romawi hingga lahirnya NKRI bukanlah hubungan sebab-akibat langsung, melainkan hubungan historis yang terbentuk melalui sejumlah mata rantai transformasi. NKRI merupakan hasil interaksi antara perubahan dunia dan tindakan politik

Keywords

masyarakat Indonesia sendiri. Sejarah global menyediakan struktur dan peluang, tetapi bangsa Indonesia melalui organisasi, ideologi, diplomasi, dan perjuangan menentukan arah perubahan tersebut.

sejarah global, Romawi, kolonialisme, kapitalisme, nasionalisme, Nusantara, Hindia Belanda, Jepang, Proklamasi, NKRI.

Pendahuluan

Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sering kali diceritakan melalui rangkaian peristiwa yang berlangsung di dalam wilayah Nusantara: kedatangan bangsa Eropa, kolonialisme Belanda, lahirnya organisasi pergerakan nasional, Sumpah Pemuda, pendudukan Jepang, Proklamasi 17 Agustus 1945, revolusi kemerdekaan, dan pengakuan kedaulatan. Rangkaian tersebut memang merupakan bagian pokok dari sejarah Indonesia. Akan tetapi, apabila sejarah Indonesia hanya dipahami sebagai sejarah internal, terdapat risiko bahwa proses kelahiran negara Indonesia tampak seolah-olah berlangsung dalam ruang yang terpisah dari perkembangan dunia.

Padahal, hampir setiap tahap pembentukan Indonesia mempunyai hubungan dengan perubahan global. Perdagangan rempah-rempah yang membawa Portugis dan Belanda ke Asia tidak dapat dilepaskan dari perubahan ekonomi Eropa. Penguasaan Malaka dan Maluku berkaitan dengan perkembangan teknologi pelayaran, persaingan kerajaan Eropa, dan perubahan jaringan perdagangan Samudra Hindia. Pembentukan negara kolonial Hindia Belanda berkaitan dengan perkembangan kapitalisme, revolusi industri, serta kebutuhan negara-negara Eropa akan bahan mentah dan pasar. Pendidikan modern yang kemudian melahirkan kelompok intelektual Indonesia merupakan bagian dari perubahan sosial kolonial sekaligus membuka akses masyarakat terdidik terhadap gagasan liberalisme, nasionalisme, sosialisme, dan anti-imperialisme.

Demikian pula, kemerdekaan Indonesia pada 1945 tidak berdiri sendiri. Dua perang dunia telah mengubah peta kekuasaan internasional. Perang Dunia I melemahkan legitimasi imperialisme lama dan memperkenalkan gagasan mengenai hak menentukan nasib sendiri. Perang Dunia II menghancurkan sebagian besar kekuatan imperial Eropa di Asia. Kekalahan Jepang pada Agustus 1945 menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh pemimpin Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Setelah itu, perjuangan Indonesia memperoleh dimensi internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, keterlibatan Australia, Amerika Serikat, India, dan negara-negara Asia lainnya, serta perubahan politik di Belanda.

Karena itu, hubungan antara perubahan dunia dan lahirnya NKRI perlu dipahami sebagai jaringan sebab-akibat yang panjang. Tidak tepat mengatakan bahwa runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 "menyebabkan" Indonesia merdeka pada 1945. Jarak waktunya lebih dari 1.400 tahun dan terlalu banyak faktor yang bekerja di antaranya. Namun, dapat dikatakan bahwa perubahan yang bermula dari transformasi dunia pasca-Romawi ikut membentuk lingkungan politik, ekonomi, intelektual, dan

teknologi yang pada akhirnya memungkinkan terbentuknya sistem dunia modern. Indonesia kemudian lahir di dalam sistem dunia tersebut.

Dalam perspektif sejarah global, Nusantara bukan wilayah pasif yang menunggu kedatangan Eropa. Sebelum kolonialisme, kepulauan ini telah terhubung dengan India, Cina, Timur Tengah, dan kawasan Asia Tenggara melalui jaringan perdagangan dan pertukaran budaya. Sriwijaya, Majapahit, Kesultanan Malaka, Aceh, Demak, Ternate, Tidore, Banten, Makassar, dan berbagai pusat kekuasaan lainnya merupakan aktor dalam jaringan regional. Kedatangan bangsa Eropa mengubah keseimbangan tersebut, tetapi tidak menciptakan hubungan global Nusantara dari nol.

Artikel ini menggunakan tesis bahwa pembentukan NKRI merupakan hasil pertemuan tiga arus sejarah. Pertama, transformasi dunia, yaitu perubahan dari masyarakat agraris-feodal menuju dunia perdagangan, kapitalisme, negara modern, industrialisasi, dan imperialisme. Kedua, integrasi Nusantara ke dalam ekonomi dan politik dunia, yang pada awalnya berlangsung melalui perdagangan tetapi kemudian berkembang menjadi kolonialisme. Ketiga, transformasi kesadaran masyarakat Nusantara menjadi kesadaran kebangsaan Indonesia, yang melahirkan gagasan bahwa penduduk kepulauan yang sangat beragam dapat membentuk satu bangsa dan satu negara.

Dengan kerangka tersebut, pembahasan dimulai dari keruntuhan Romawi Barat, perkembangan dunia abad pertengahan, kebangkitan Islam dan jaringan perdagangan Asia, ekspansi maritim Eropa, kolonialisme di Nusantara, revolusi politik dan industri, imperialisme modern, nasionalisme Indonesia, dua perang dunia, pendudukan Jepang, Proklamasi, Revolusi Indonesia, dan akhirnya pembentukan negara kesatuan.

Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan sejarah global dan sejarah hubungan internasional, dengan menghubungkan perkembangan makro dunia dengan perubahan sosial-politik di Nusantara. Pendekatan tersebut menghindari dua ekstrem: pertama, menganggap sejarah Indonesia sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan luar; kedua, menganggap sejarah Indonesia berlangsung tanpa hubungan dengan perubahan global.

Sumber primer yang digunakan antara lain dokumentasi Arsip Nasional Republik Indonesia mengenai Proklamasi, Sumpah Pemuda, revolusi, pembentukan pemerintahan, serta penyerahan kedaulatan; sementara sumber sekunder berupa karya-karya sejarah Indonesia, Asia Tenggara, nasionalisme, dan sejarah global digunakan untuk membangun interpretasi. Dokumentasi ANRI menegaskan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan tonggak berdirinya Republik Indonesia dan bahwa pada 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD serta menetapkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dengan pendekatan ini, hubungan antara keruntuhan Romawi dan lahirnya NKRI dipahami bukan sebagai garis lurus, melainkan sebagai rantai transformasi historis dari perubahan struktur dunia, ekspansi perdagangan, kolonialisme, modernisasi, nasionalisme, krisis imperialism, dekolonisasi, hingga pembentukan negara Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Indonesia sebagai Bagian dari Sejarah Global

Sejarah global tidak berarti menghapus sejarah nasional. Sebaliknya, sejarah global membantu menjelaskan bagaimana peristiwa yang terjadi di satu tempat dapat menciptakan konsekuensi di tempat lain. Kerangka ini penting untuk memahami Indonesia karena wilayah Nusantara sejak masa awal sejarah telah menjadi persimpangan jalur maritim. Ada empat konsep yang berguna untuk memahami hubungan tersebut. Pertama adalah jaringan. Perdagangan tidak hanya memindahkan barang, tetapi juga manusia, teknologi, bahasa, agama, gagasan, dan informasi. Rempah-rempah dari Maluku dapat mencapai India, Timur Tengah, Laut Tengah, dan Eropa. Sebaliknya, teknologi, mata uang, agama, dan berbagai unsur budaya dari luar masuk ke Nusantara.

Kedua adalah kekuatan negara. Perdagangan pada awalnya dapat berlangsung tanpa penguasaan langsung terhadap wilayah. Namun, sejak akhir abad ke-15 dan abad ke-16, negara-negara Eropa mulai menggunakan kekuatan militer untuk menguasai jalur perdagangan. Dalam perkembangan berikutnya, perusahaan dagang seperti VOC bertindak dengan hak-hak yang menyerupai negara. Ketiga adalah perubahan teknologi. Teknologi navigasi, kapal samudra, senjata api, percetakan, kereta api, telegraf, kapal uap, dan kemudian radio mempercepat perubahan hubungan antarmasyarakat. Teknologi modern tidak hanya memperkuat negara kolonial, tetapi juga membantu kaum nasionalis berkomunikasi dan membangun organisasi.

Keempat perubahan gagasan. Konsep tentang kerajaan dan kekuasaan yang bersumber dari tradisi berubah ketika gagasan kedaulatan rakyat, kebebasan, persamaan, bangsa, dan hak menentukan nasib sendiri berkembang. Gagasan tersebut pada awalnya berkembang di Eropa, tetapi kemudian diadopsi, dimodifikasi, dan diperdebatkan oleh masyarakat Asia dan Afrika. Oleh sebab itu, sejarah Indonesia modern dapat dipahami sebagai proses globalisasi yang tidak seimbang. Nusantara semakin terintegrasi dengan dunia, tetapi integrasi tersebut pada mulanya terjadi dalam hubungan kekuasaan yang timpang. Kolonialisme menghubungkan Indonesia dengan ekonomi dunia sekaligus mengeksploitasi masyarakat dan sumber daya. Ironisnya, sistem kolonial yang memperluas kekuasaan Belanda juga menciptakan sarana yang kemudian digunakan masyarakat Indonesia untuk melawan kolonialisme: sekolah, pers, birokrasi, jaringan transportasi, dan konsep wilayah administratif yang lebih terintegrasi.

Runtuhnya Romawi Barat dan Lahirnya Dunia Abad Pertengahan

Pada abad ke-5 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat mengalami keruntuhan politik. Tahun 476 sering digunakan sebagai simbol berakhirnya Kekaisaran Romawi Barat karena pada tahun tersebut penguasa militer Odoacer menggulingkan Romulus Augustulus. Namun, keruntuhan itu sebenarnya merupakan proses panjang. Kekaisaran mengalami masalah ekonomi, konflik politik, tekanan militer, perubahan demografi, dan migrasi berbagai kelompok masyarakat di Eropa. Kendati begitu, Kekaisaran Romawi Timur, yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, tetap bertahan selama hampir seribu tahun dengan pusat di Konstantinopel. Karena itu, abad ke-5 bukanlah

akhir peradaban Romawi secara keseluruhan, melainkan perubahan besar dalam konfigurasi politik Eropa dan Mediterania.

Di Eropa Barat, runtuhnya pemerintahan Romawi menyebabkan munculnya berbagai kerajaan baru. Struktur administratif Romawi tidak sepenuhnya hilang, tetapi mengalami transformasi. Gereja Kristen menjadi salah satu institusi yang mampu mempertahankan jaringan sosial dan intelektual yang melampaui batas kerajaan. Latin tetap menjadi bahasa administrasi dan pendidikan di banyak wilayah. Tradisi hukum, politik, dan budaya Romawi juga terus diwariskan dalam bentuk yang berubah. Periode yang kemudian dikenal sebagai Abad Pertengahan bukanlah masa tanpa perubahan. Justru pada masa tersebut terbentuk sejumlah unsur penting yang kelak membantu kelahiran Eropa modern: kerajaan-kerajaan baru, sistem feodal, perkembangan kota, universitas, jaringan perdagangan, teknologi pertanian, dan institusi keagamaan.

Di luar Eropa Barat, perubahan yang sama berlangsung. Kekaisaran Bizantium mempertahankan hubungan dengan dunia Mediterania. Persia mengalami perubahan dinasti. India memiliki kerajaan-kerajaan regional dan jaringan perdagangan dengan Asia Tenggara. Cina mengalami pergantian dinasti tetapi tetap menjadi salah satu pusat ekonomi dan teknologi dunia. Sementara itu, semenanjung Arabia mengalami perubahan fundamental dengan munculnya Islam pada abad ke-7. Perubahan dunia setelah Romawi dengan demikian tidak dapat dilihat sebagai cerita tentang Eropa saja. Dunia menjadi semakin terhubung melalui jaringan yang meliputi Mediterania, Laut Merah, Samudra Hindia, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara.

Kebangkitan Islam dan Jaringan Samudra Hindia

Munculnya Islam pada abad ke-7 membawa perubahan besar dalam sejarah dunia. Dalam beberapa abad, wilayah kekuasaan dan kebudayaan Islam membentang dari Timur Tengah, Semenanjung Iberia, Afrika Utara hingga Asia Tengah, dan sebagian Asia Selatan. Perubahan tersebut menciptakan ruang ekonomi dan intelektual yang sangat luas. Kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, dan kemudian berbagai pusat perdagangan lainnya menjadi penghubung antara wilayah yang berbeda. Ilmu matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan geografi berkembang melalui pertukaran antara tradisi Yunani, Persia, India, dan Arab. Bagi sejarah Indonesia, yang sangat penting adalah perkembangan perdagangan Samudra Hindia. Angin muson memungkinkan pelayaran reguler antara India, Arabia, Afrika Timur, Sri Lanka, dan Asia Tenggara yang membawa pedang dengan komoditas, termasuk agama dan budaya.

Islam masuk ke Asia Tenggara secara bertahap, terutama melalui jaringan perdagangan dan komunitas pelabuhan. Proses Islamisasi tidak terjadi melalui satu ekspedisi militer atau satu tanggal tertentu. Para pedagang, ulama, perkawinan elite, dan kerajaan pelabuhan memainkan peran penting. Dengan demikian, jauh sebelum kedatangan Portugis, Nusantara telah menjadi bagian dari sistem perdagangan internasional. Malaka berkembang sebagai pusat perdagangan penting di Selat Malaka. Aceh kemudian menjadi kekuatan penting di bagian barat Nusantara. Di wilayah timur, Maluku menjadi pusat produksi cengkih dan pala yang sangat bernilai. Kondisi tersebut

menjadi salah satu alasan mengapa kepulauan Nusantara kemudian menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa.

Dari Perdagangan ke Ekspansi Maritim Eropa

Pada akhir abad pertengahan terjadi perubahan penting di Eropa. Kota-kota tumbuh, perdagangan berkembang, dan kerajaan-kerajaan mulai memiliki kemampuan administratif serta militer yang lebih besar. Perkembangan pelayaran menjadi faktor strategis. Portugis merupakan salah satu pelopor ekspansi maritim. Mereka secara bertahap menyusuri pantai Afrika, melewati Tanjung Harapan, dan mencapai Samudra Hindia. Tujuannya antara lain memperoleh akses langsung terhadap perdagangan Asia dan mengurangi ketergantungan pada jalur perdagangan yang dikuasai kekuatan lain.

Spanyol mengambil jalur berbeda melalui pelayaran ke arah barat. Ekspedisi Christopher Columbus pada 1492 membuka hubungan Eropa dengan benua Amerika bagi dunia politik Eropa, meskipun pada awalnya Columbus mengira dirinya telah mendekati Asia. Dalam konteks ini, dunia memasuki tahap baru yaitu jaringan antarbenua semakin intensif.

Perjanjian Tordesillas 1494 antara Spanyol dan Portugis menjadi contoh bagaimana kekuatan Eropa berusaha membagi wilayah dunia yang mereka anggap dapat dieksplorasi dan dikuasai. Perjanjian tersebut kemudian mempunyai implikasi sampai ke kawasan Asia dan kepulauan Maluku. Library of Congress mencatat bahwa persaingan Portugis-Spanyol di Maluku berkaitan erat dengan pembagian wilayah dunia melalui Tordesillas dan kemudian persaingan atas Kepulauan Rempah.

Pada awal abad ke-16, Portugis telah mencapai India dan kemudian bergerak ke Asia Tenggara. Mereka merebut Malaka pada 1511. Penguasaan Malaka memberikan keuntungan strategis karena Selat Malaka merupakan salah satu jalur utama perdagangan Asia. Namun, penguasaan Malaka tidak berarti Portugis menguasai seluruh Nusantara. Sebaliknya, mereka memasuki dunia politik yang telah memiliki kerajaan, kesultanan, pedagang, dan jaringan perdagangan sendiri.

Maluku menjadi salah satu titik penting. Kepulauan tersebut merupakan sumber cengkih dan pala, komoditas yang sangat mahal di pasar dunia. Persaingan Portugis, Spanyol, dan kemudian Belanda atas Maluku menunjukkan bahwa Nusantara telah menjadi bagian langsung dari politik ekonomi global. Sumber-sumber sejarah yang tersimpan di Library of Congress bahkan menggambarkan perjuangan Portugis, Spanyol, dan penguasa lokal untuk mengendalikan Maluku pada abad ke-16. Pada tahap ini terlihat sebuah perubahan mendasar. Sebelumnya, hubungan Nusantara dengan dunia berlangsung terutama melalui perdagangan dan pertukaran budaya. Setelah kedatangan bangsa Eropa, perdagangan mulai disertai dengan kekuatan militer dan usaha monopoli.

Rempah-rempah dan Integrasi Nusantara ke Ekonomi Dunia

Rempah-rempah memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar komoditas konsumsi. Pala dan cengkih digunakan dalam pengobatan, makanan, pengawetan, dan berbagai kebutuhan masyarakat Eropa. Karena produksinya sangat terbatas secara

geografis, nilainya sangat tinggi. Maluku menjadi salah satu sumber utama rempah-rempah tersebut. Dengan demikian, pulau-pulau yang secara geografis kecil memiliki posisi strategis dalam perdagangan global.

Kedatangan Portugis dan Spanyol mengubah hubungan kekuasaan lokal. Mereka berusaha membuat perjanjian dengan penguasa setempat, mendirikan benteng, mengontrol pelabuhan, dan membatasi perdagangan dengan pesaing. Akan tetapi, penguasa lokal juga menggunakan bangsa Eropa untuk kepentingan politik mereka sendiri. Hubungan tersebut tidak dapat digambarkan secara sederhana sebagai hubungan antara bangsa Eropa yang selalu kuat dan masyarakat lokal yang selalu lemah. Realitasnya merupakan persaingan multipihak. Kesultanan Ternate dan Tidore, misalnya, mempunyai kepentingan sendiri dan menggunakan hubungan dengan Portugis atau Spanyol dalam menghadapi rival regional.

Kemudian muncul Belanda. Ekspedisi Belanda pertama mencapai Nusantara pada akhir abad ke-16. Pada 1602 didirikan *Verenigde Oostindische Compagnie* atau VOC. Perusahaan ini merupakan salah satu contoh penting perubahan dalam sejarah kapitalisme dunia karena memperoleh hak istimewa dari negara Belanda, termasuk hak membuat perjanjian, membentuk pasukan, mendirikan benteng, dan melakukan peperangan.

VOC mendirikan Batavia pada 1619 sebagai pusat kekuasaan. Dari sana, kekuatan Belanda secara bertahap memperluas pengaruhnya. Sejarah ini penting karena menunjukkan transformasi dari perusahaan dagang menjadi kekuasaan teritorial. Tujuan awal memperoleh keuntungan dari perdagangan berkembang menjadi kebutuhan menguasai produksi, pelabuhan, tenaga kerja, dan wilayah. Penelitian mengenai perdagangan Asia Tenggara menunjukkan bahwa perusahaan Eropa seperti VOC dan EIC sering kali berperang dengan penguasa lokal ketika membangun pusat perdagangan dan wilayah kekuasaan. Batavia, Melaka, dan Manila menjadi contoh bagaimana pusat perdagangan Eropa berkembang menjadi enclave politik dan militer.

Dari VOC ke Negara Kolonial

VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18 dan dibubarkan pada 1799. Aset dan wilayah kekuasaannya kemudian diambil alih pemerintah Belanda. Proses ini penting karena kekuasaan di Nusantara bergeser dari perusahaan kepada negara. Perubahan tersebut merupakan bagian dari perkembangan negara modern di Eropa. Negara semakin mampu memungut pajak, membentuk tentara, mengembangkan birokrasi, dan mengelola wilayah secara terpusat.

Pada masa berikutnya, wilayah yang kemudian disebut Hindia Belanda berkembang sebagai negara kolonial. Pemerintah kolonial tidak sekadar menguasai pusat perdagangan, tetapi membangun administrasi, hukum, pajak, tentara, dan infrastruktur. Perubahan besar terjadi pada abad ke-19 setelah berbagai perang Napoleon dan restrukturisasi kekuasaan Eropa. Belanda semakin berusaha menjadikan Hindia sebagai sumber pendapatan.

Salah satu instrumen penting adalah *Cultuurstelsel* atau Sistem Tanam Paksa yang mulai diterapkan pada 1830. Penduduk di berbagai daerah diwajibkan menyerahkan

sebagian tanah atau tenaga untuk tanaman ekspor tertentu. Sistem tersebut menghasilkan keuntungan besar bagi pemerintah Belanda, tetapi menimbulkan beban berat bagi masyarakat. Pada titik ini, Nusantara semakin terintegrasi dengan kapitalisme dunia. Gula, kopi, teh, tembakau, dan komoditas lainnya menjadi bagian dari pasar internasional. Integrasi tersebut mempunyai dua wajah. Di satu sisi, perdagangan internasional mendorong pembangunan jalan, pelabuhan, perkebunan, dan jaringan administrasi. Di sisi lain, struktur ekonomi tersebut dirancang untuk kepentingan kolonial dan menghasilkan ketimpangan sosial.

Renaissans, Reformasi, Revolusi Ilmiah, dan Perubahan Cara Pandang Dunia

Sementara kolonialisme berkembang, Eropa mengalami transformasi intelektual. Renaissance yang berkembang sejak akhir abad pertengahan memperkuat minat terhadap warisan klasik, humanisme, seni, dan kemampuan manusia. Percetakan mempercepat penyebaran gagasan. Reformasi Protestan pada abad ke-16 menantang otoritas Gereja Katolik di berbagai wilayah Eropa dan ikut mengubah struktur politik. Kemudian Revolusi Ilmiah mendorong cara baru dalam memahami alam melalui observasi, matematika, dan eksperimen. Pengetahuan geografis juga berkembang. Peta dunia menjadi semakin akurat dan menjadi alat penting bagi perdagangan serta kekuasaan.

Perubahan intelektual tersebut pada akhirnya melahirkan Pencerahan pada abad ke-17 dan ke-18. Para pemikir Pencerahan memperdebatkan kebebasan, rasionalitas, hukum, pemerintahan, dan hak manusia. Gagasan tersebut kemudian mempunyai konsekuensi politik. Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis 1789 menjadi tonggak penting dalam sejarah politik modern. Konsep bahwa kekuasaan politik tidak semata-mata berasal dari raja, tetapi berhubungan dengan rakyat dan hukum, berkembang semakin luas.

Meskipun gagasan tersebut tidak langsung diterapkan secara universal, ia menciptakan bahasa politik baru. Bahasa mengenai kebebasan, kesetaraan, kewarganegaraan, konstitusi, bangsa, dan kedaulatan kemudian dapat digunakan oleh masyarakat di luar Eropa. Inilah salah satu mata rantai terpenting antara sejarah Eropa dan sejarah Indonesia. Ketika pendidikan modern berkembang di Hindia Belanda, generasi intelektual Indonesia mulai mengenal gagasan-gagasan politik modern tersebut.

Revolusi Industri dan Lahirnya Imperialisme Modern

Jika Pencerahan mengubah dunia pemikiran, Revolusi Industri mengubah struktur ekonomi dan sosial. Dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18 dan kemudian menyebar ke Eropa serta Amerika Utara, industrialisasi menghasilkan mesin, pabrik, produksi massal, transportasi modern, dan perubahan besar dalam hubungan kerja. Kapal uap dan kereta api mempercepat perpindahan manusia dan barang. Telegraf mempercepat komunikasi. Dunia yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk mengirim informasi secara bertahap berubah menjadi dunia dengan komunikasi yang jauh lebih cepat.

Industrialisasi juga meningkatkan kebutuhan negara-negara industri terhadap bahan mentah dan pasar. Karet, minyak, timah, gula, kopi, teh, rempah-rempah, dan berbagai komoditas tropis semakin penting. Akibatnya, imperialisme pada abad ke-19 berbeda dari ekspansi perdagangan pada abad ke-16. Imperialisme modern semakin terorganisasi melalui birokrasi negara, perusahaan, militer, dan sistem transportasi.

Hindia Belanda mempunyai posisi penting dalam sistem tersebut. Perkebunan dan pertambangan berkembang. Infrastruktur seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan jaringan komunikasi dibangun terutama untuk menghubungkan wilayah produksi dengan pusat perdagangan. Di satu sisi, pembangunan tersebut meningkatkan konektivitas antardaerah. Di sisi lain, orientasi ekonominya tetap kolonial. Ironi sejarah mulai terlihat dengan jelas: kolonialisme menciptakan integrasi wilayah yang pada kemudian hari membantu munculnya kesadaran nasional. Jaringan kereta api dan pelayaran memudahkan mobilitas. Sekolah menghasilkan kelompok terdidik. Surat kabar menyebarkan gagasan. Kota-kota kolonial menjadi pusat perdebatan politik.

Kebangkitan Nasional dan Perubahan Identitas

Kelompok Terpelajar

Pada 1901, pemerintah Belanda secara resmi mengumumkan arah kebijakan yang dikenal sebagai Politik Etis. Kebijakan tersebut antara lain menekankan pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Tujuannya bukan semata-mata membebaskan masyarakat Indonesia, melainkan memperbaiki administrasi dan kehidupan penduduk kolonial dalam kerangka kekuasaan Belanda. Namun, konsekuensi historisnya jauh lebih luas. Perluasan pendidikan menciptakan kelompok terpelajar bumiputra. Mereka memperoleh kesempatan mengenal bahasa Belanda, ilmu pengetahuan, sejarah dunia, dan pemikiran politik modern. Sejumlah orang kemudian melanjutkan pendidikan ke luar negeri, terutama Belanda.

Studi mengenai sejarah sosial Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan Barat memperkenalkan sebagian elite Indonesia kepada gagasan mengenai nasionalisme, hak menentukan nasib sendiri, organisasi mahasiswa, hak pekerja, dan politik modern. Dengan demikian, pendidikan kolonial menghasilkan paradoks. Pemerintah kolonial bermaksud menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan administrasi yang lebih efektif, tetapi pendidikan tersebut juga membantu lahirnya kelompok yang mempertanyakan legitimasi kolonialisme.

Kebangkitan Nasional

Selain itu, pada awal abad ke-20 terjadi perubahan penting dalam cara sebagian masyarakat Nusantara membayangkan dirinya. Sebelumnya, identitas politik terutama terkait kerajaan, kesultanan, daerah, etnis, agama, dan komunitas lokal. Sekarang muncul gagasan tentang bangsa yang lebih luas. Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1908 sering ditempatkan sebagai salah satu tonggak Kebangkitan Nasional. Organisasi ini pada awalnya memiliki fokus pendidikan dan kebudayaan, tetapi kemunculannya menandai perubahan bentuk organisasi masyarakat terpelajar.

ANRI mencatat 20 Mei 1908 sebagai momentum munculnya kesadaran kolektif yang melibatkan kelompok dengan latar belakang sosial dan profesi yang berbeda dalam gerakan yang lebih nasional. Setelah itu muncul berbagai organisasi dengan orientasi berbeda. Sarekat Islam berkembang sebagai organisasi massa yang mempunyai pengaruh luas. Indische Partij mengemukakan gagasan politik yang lebih tegas mengenai persamaan dan kemerdekaan. Perhimpunan Indonesia di Belanda memainkan peran penting dalam memperkenalkan gagasan Indonesia sebagai bangsa.

Pada 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Aktivitas politiknya memperlihatkan bahwa nasionalisme Indonesia telah berkembang menjadi gerakan politik yang secara terbuka menuntut kemerdekaan. Arsip kepresidenan ANRI mencatat bahwa PNI didirikan dengan tujuan Indonesia merdeka dan bahwa aktivitas Soekarno kemudian berhadapan langsung dengan pemerintah kolonial.

Sumpah Pemuda

Jika Kebangkitan Nasional memperkenalkan organisasi modern, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memperjelas identitas nasional. Pemuda dari berbagai organisasi daerah berkumpul dalam Kongres Pemuda II. Mereka menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia. Dokumen Sumpah Pemuda memperlihatkan bahwa para pemuda secara sadar memilih identitas Indonesia di atas identitas primordial yang lebih sempit.

Indonesia bukan bangsa yang sudah ada dalam bentuk negara modern sejak zaman kuno. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit memang memiliki wilayah pengaruh luas, tetapi keduanya bukan negara-bangsa Indonesia modern. Demikian pula penduduk Jawa, Sumatra, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali, Papua, dan wilayah lainnya memiliki sejarah, bahasa, dan struktur politik masing-masing.

Indonesia sebagai bangsa modern merupakan hasil proses politik dan kebudayaan. Sumpah Pemuda menjadi salah satu tahap terpenting dalam proses tersebut. Bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi lintas daerah. Pers, sekolah, organisasi, dan mobilitas penduduk memperkuat pembentukan identitas baru. Karena itu, kemerdekaan 1945 tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat kekalahan Jepang. Jepang memang menciptakan kondisi politik yang sangat penting, tetapi bangsa Indonesia telah membangun identitas kebangsaan selama beberapa dekade sebelumnya.

Krisis Imperialisme dan Runtuhnya Kekuasaan Eropa di Asia: Perang Dunia I dan II

Perang Dunia I 1914–1918 mengubah struktur dunia. Kekaisaran-kekaisaran besar di Eropa runtuh atau melemah. Kekaisaran Ottoman, Austro-Hungaria, Rusia, dan Jerman mengalami perubahan besar. Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson memperkenalkan gagasan mengenai penentuan nasib sendiri, meskipun penerapannya tidak konsisten dan tidak langsung mengakhiri kolonialisme. Bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika, kontradiksi tersebut menjadi semakin jelas. Jika bangsa Eropa berhak menentukan nasib sendiri, mengapa bangsa-bangsa Asia dan Afrika tidak.

Gerakan nasional Indonesia membaca perubahan tersebut. Para pemimpin pergerakan semakin melihat bahwa kolonialisme bukan struktur yang tidak dapat diubah. Pada periode antar perang, krisis ekonomi dunia, kebangkitan sosialisme dan komunisme, serta berkembangnya gerakan anti-kolonial semakin memperkuat tantangan terhadap imperialisme. Pada saat yang sama, pemerintah kolonial Belanda meningkatkan pengawasan terhadap gerakan politik. Banyak pemimpin ditangkap, dipenjarakan, atau diasingkan. Namun, represi tidak menghilangkan gagasan kemerdekaan.

Depresi Besar yang dimulai pada 1929 memperburuk kondisi ekonomi dunia. Harga komoditas turun dan perdagangan internasional mengalami kontraksi. Bagi Hindia Belanda yang sangat bergantung pada ekspor, dampaknya sangat besar. Krisis ekonomi menunjukkan kelemahan struktur ekonomi kolonial. Masyarakat mengalami tekanan, sementara pemerintah kolonial berusaha mempertahankan stabilitas politik.

Pada periode yang sama, politik massa semakin berkembang. Sarekat Islam, organisasi keagamaan, kelompok nasionalis, organisasi buruh, kelompok pemuda, dan gerakan kiri memiliki basis sosial masing-masing. Perbedaan ideologi menjadi salah satu ciri penting gerakan nasional. Nasionalisme Indonesia tidak pernah sepenuhnya homogen. Terdapat nasionalis sekuler, Islam, sosialis, komunis, dan kelompok lainnya. Namun, terdapat persamaan fundamental: penolakan terhadap dominasi kolonial dan keinginan agar masyarakat Indonesia memiliki masa depan politik sendiri.

Perang Dunia II menjadi titik balik paling menentukan. Jepang yang sejak akhir abad ke-19 mengalami modernisasi dan industrialisasi berkembang menjadi kekuatan imperial di Asia. Jepang berusaha membangun wilayah kekuasaan yang disebut "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya". Pada praktiknya, ekspansi Jepang merupakan bentuk imperialisme yang menggunakan kekuatan militer. Pada 1941 Jepang menyerang Pearl Harbor dan kemudian bergerak cepat ke Asia Tenggara. Hindia Belanda menjadi sasaran karena minyak dan sumber daya strategis lainnya.

Pada 1942, pasukan Belanda menyerah kepada Jepang. Kekuasaan kolonial Belanda yang telah bertahan selama berabad-abad runtuh dalam waktu relatif singkat. Peristiwa ini memiliki dampak psikologis sangat besar. Mitos tentang superioritas militer Eropa runtuh di hadapan masyarakat Asia. Namun, pendudukan Jepang bukanlah pembebasan. Pemerintahan Jepang bersifat represif. Masyarakat mengalami mobilisasi paksa, kekurangan pangan, romusha, sensor, dan berbagai bentuk kekerasan. Tetapi Jepang juga mengubah struktur politik kolonial. Mereka membubarkan sebagian institusi Belanda, menggunakan bahasa Indonesia secara lebih luas, dan memberikan ruang terbatas bagi tokoh nasionalis untuk beraktivitas. Jepang kemudian semakin membutuhkan dukungan penduduk ketika posisi militernya memburuk.

Pendudukan Jepang dan Percepatan Menuju Kemerdekaan

Pendudukan Jepang menghasilkan paradoks yang sangat penting. Di satu sisi, Jepang mengeksploitasi Indonesia dengan keras. Di sisi lain, pendudukan Jepang menghancurkan struktur kekuasaan Belanda dan membuka ruang bagi elite nasionalis untuk memobilisasi masyarakat. Organisasi seperti Putera, Jawa Hokokai, dan kemudian

badan-badan persiapan kemerdekaan menjadi sarana interaksi antara pemerintah pendudukan dengan tokoh Indonesia. Pembentukan BPUPKI pada 1945 memberikan ruang untuk membahas persoalan fundamental negara: dasar negara, wilayah, kewarganegaraan, dan konstitusi. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan Pancasila. Gagasan tersebut menjadi salah satu fondasi ideologis negara yang sedang dipersiapkan.

Hal yang menarik adalah bahwa gagasan negara Indonesia tidak sekadar meniru negara Eropa. Para pemimpin Indonesia menggabungkan berbagai sumber pemikiran: nasionalisme, demokrasi, sosialisme, tradisi Islam, pemikiran hukum, pengalaman kolonial, dan warisan budaya Nusantara. Dengan demikian, proses pembentukan negara Indonesia merupakan proses kreatif, bukan sekadar transfer institusi Barat.

Pada Agustus 1945, Jepang berada dalam posisi kalah. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus dan Nagasaki pada 9 Agustus. Uni Soviet juga memasuki perang melawan Jepang. Pada 15 Agustus 1945 Jepang menyatakan menyerah. Peristiwa tersebut menciptakan situasi politik yang luar biasa. Secara formal, Jepang masih memiliki kewajiban menjaga status quo sampai kedatangan Sekutu. Tetapi secara faktual, kekuasaan Jepang telah kehilangan legitimasi. Kelompok pemuda Indonesia melihat kesempatan tersebut sebagai momentum untuk segera menyatakan kemerdekaan.

Terjadi perbedaan pendapat dengan Soekarno-Hatta mengenai waktu dan mekanisme proklamasi. Peristiwa Rengasdengklok menjadi bagian dari dinamika tersebut. Pada dini hari 17 Agustus 1945, naskah proklamasi dirumuskan di kediaman Laksamana Tadashi Maeda. ANRI menyimpan dokumentasi yang menunjukkan bahwa perumusan berlangsung pada dini hari sebelum pembacaan Proklamasi. Pada pagi hari 17 Agustus, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Arsip ANRI mencatat pembacaan berlangsung sekitar pukul 10.00 dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih. Proklamasi tersebut merupakan tindakan politik yang sangat berani.

Proklamasi dan Lahirnya Republik Indonesia

Proklamasi memiliki dua makna sekaligus. Pertama, proklamasi merupakan deklarasi bahwa bangsa Indonesia tidak lagi menerima kekuasaan kolonial. Kedua, proklamasi merupakan dasar untuk membangun pemerintahan negara. Namun, sebuah negara tidak cukup hanya dengan deklarasi. Negara membutuhkan pemerintahan, konstitusi, wilayah, penduduk, alat keamanan, administrasi, dan legitimasi. Karena itu, pada 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Soekarno sebagai Presiden serta Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

ANRI mencatat bahwa sehari setelah Proklamasi, PPKI mengesahkan UUD dan menetapkan kepemimpinan Republik. Pada hari-hari berikutnya dibentuk kementerian, pemerintahan daerah, organisasi keamanan, dan berbagai lembaga negara. Negara baru tersebut mulai menjalankan fungsi administratifnya. Namun, masalah terbesar adalah legitimasi dan kekuasaan nyata di lapangan. Belanda berusaha kembali ke Indonesia

dengan dukungan Sekutu. Pemerintah Republik harus menghadapi ancaman bahwa kemerdekaan akan dibatalkan.

Periode 1945–1949 merupakan fase mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan berlangsung melalui dua jalur yang saling melengkapi: perjuangan bersenjata dan diplomasi. Pertempuran Surabaya November 1945 menjadi simbol perlawanan bersenjata. Berbagai daerah juga mengalami konflik antara pasukan Republik, Belanda, dan kekuatan lainnya. Tetapi Indonesia menyadari bahwa perjuangan tidak dapat hanya dilakukan melalui perang karena pengakuan internasional diperlukan.

Perundingan Linggarjati menjadi salah satu langkah penting. Kemudian terjadi Perjanjian Renville pada 1947–1948. Perjanjian Renville menghasilkan kondisi yang merugikan Republik, antara lain pengakuan terbatas terhadap wilayah Republik dan penarikan pasukan Republik dari sejumlah wilayah. ANRI mencatat bahwa perundingan Renville dimulai pada 8 Desember 1947 dan melibatkan Komisi Tiga Negara sebagai mediator.

Belanda kemudian melancarkan Agresi Militer I dan II. Pada Agresi Militer II, Yogyakarta diduduki dan pemimpin Republik ditangkap. Namun, Republik tidak runtuh. Pemerintahan darurat dibentuk di Sumatra. Gerilya terus dilakukan. Diplomasi internasional juga semakin kuat. Perjuangan Indonesia dengan demikian menjadi bagian dari perubahan politik dunia pasca-Perang Dunia II.

Setelah Perang Dunia II, dunia memasuki sistem internasional baru. Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada 1945. Konsep kedaulatan negara dan penyelesaian konflik melalui lembaga internasional memperoleh tempat yang lebih penting. Belanda tidak lagi berhadapan dengan Indonesia dalam ruang kosong. Australia, India, Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lain mempunyai kepentingan terhadap konflik tersebut.

Australia menjadi salah satu negara yang memainkan peran diplomatik penting. Dukungan internasional membantu membawa persoalan Indonesia ke forum internasional dan meningkatkan tekanan terhadap Belanda. Di sisi lain, Amerika Serikat mulai melihat bahwa pemulihan ekonomi Eropa dan stabilitas politik dunia tidak dapat dipisahkan dari persoalan kolonialisme. Perang Dingin juga mulai terbentuk.

Belanda pada akhirnya menghadapi dilema. Mempertahankan perang di Indonesia membutuhkan biaya besar dan berpotensi mengganggu hubungan dengan Amerika Serikat. Konferensi Meja Bundar di Den Haag kemudian menghasilkan kesepakatan mengenai penyerahan kedaulatan. Menurut dokumentasi yang tercatat dalam koleksi ANRI, Belanda menyerahkan kedaulatan pada 27 Desember 1949 kepada Republik Indonesia Serikat. Meski begitu, terdapat satu persoalan penting dalam memahami istilah NKRI. Secara historis, pada 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan adalah Republik Indonesia, bukan "Negara Kesatuan Republik Indonesia" sebagai nama resmi dalam konfigurasi 1949–1950. Setelah Konferensi Meja Bundar, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

RIS terdiri atas sejumlah negara bagian. Struktur federal tersebut merupakan bagian dari kompromi politik dengan Belanda dan kelompok-kelompok federal yang telah dibentuk selama revolusi. Namun, sebagian besar kekuatan politik Indonesia

memandang federalisme tersebut sebagai warisan politik pecah-belah kolonial. Keinginan untuk kembali kepada negara kesatuan semakin kuat. Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan nama Republik Indonesia. Dengan demikian, proses pembentukan NKRI dapat dilihat sebagai rangkaian. ANRI mencatat bahwa sebelum dan sesudah penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949 terjadi proses transisi kelembagaan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia. Karena itu, istilah "lahirnya NKRI" sebaiknya dipahami sebagai proses historis, bukan hanya satu tanggal tunggal.

Benang Merah dari Romawi hingga Indonesia

Jika seluruh rangkaian sejarah tersebut diringkas, terdapat sejumlah mata rantai yang menghubungkan abad ke-5 dengan abad ke-20. Runtuhnya Romawi Barat mengakhiri satu bentuk pemerintahan imperial di Eropa Barat dan melahirkan struktur politik baru. Dari proses panjang tersebut berkembang kerajaan-kerajaan Eropa yang kemudian menjadi negara modern. Pertumbuhan kota dan perdagangan meningkatkan kekayaan kelompok pedagang dan memperkuat negara. Kompetisi ekonomi kemudian mendorong pencarian jalur baru menuju Asia.

Teknologi pelayaran, navigasi, persenjataan, dan kartografi memungkinkan bangsa Eropa mencapai Asia melalui jalur laut. Ekspansi Portugis dan Spanyol membawa Nusantara masuk lebih langsung ke dalam kompetisi global. Persaingan tersebut kemudian dilanjutkan Belanda dan Inggris. Perdagangan rempah-rempah berkembang menjadi sistem perusahaan, monopoli, perkebunan, dan ekonomi kolonial. VOC menjadi contoh awal korporasi yang memiliki kekuasaan politik dan militer.

Kekuasaan kolonial berkembang menjadi administrasi teritorial. Hindia Belanda menjadi satuan politik yang wilayahnya semakin luas dan administratif. Ironisnya, kesatuan administratif tersebut kemudian menjadi salah satu dasar wilayah negara Indonesia. Pendidikan modern memperkenalkan masyarakat Indonesia kepada gagasan kebebasan, bangsa, demokrasi, sosialisme, dan hak menentukan nasib sendiri. Gagasan bangsa kemudian diadaptasi menjadi gagasan tentang Indonesia. Budi Utomo, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, PNI, organisasi pemuda, dan berbagai gerakan lainnya menjadi sarana pembentukan identitas nasional.

Perang Dunia I melemahkan legitimasi imperialisme lama. Perang Dunia II menghancurkan kemampuan negara-negara Eropa untuk mempertahankan kolonialisme di Asia seperti sebelumnya. Pendudukan Jepang menghancurkan pemerintahan kolonial Belanda dan menciptakan kondisi politik yang memungkinkan kaum nasionalis mengambil alih momentum ketika Jepang kalah. Setelah 1945, Indonesia memanfaatkan perubahan sistem internasional untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan nasional menjadi perjuangan internasional.

Pertanyaan penting berikutnya adalah apakah negara Indonesia merupakan produk Barat karena konsep negara-bangsa modern berkembang terutama di Eropa. Bentuk negara modern memang berkembang dalam sejarah Eropa. Konsep konstitusi, birokrasi modern, kewarganegaraan, dan negara teritorial mengalami perkembangan

penting di Barat. Namun, Indonesia tidak sekadar menyalin model tersebut. Negara Indonesia dibangun melalui percampuran berbagai sumber.

Pertama, terdapat warisan politik Nusantara: kerajaan, kesultanan, hukum adat, tradisi musyawarah, dan gagasan tentang hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Kedua, terdapat warisan agama: Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan tradisi keagamaan lainnya. Ketiga, terdapat pengaruh pemikiran Barat: liberalisme, nasionalisme, sosialisme, demokrasi, konstitusionalisme, dan anti-imperialisme. Keempat, terdapat pengalaman kolonial yang sangat khas. Masyarakat Indonesia mengalami eksploitasi, diskriminasi, dan pemerintahan kolonial, tetapi juga memperoleh pendidikan dan pengalaman organisasi yang kemudian digunakan untuk membangun negara.

Oleh karena itu, salah satu paradoks terbesar dalam sejarah Indonesia adalah bahwa kolonialisme berperan dalam membentuk kondisi material yang kemudian memungkinkan nasionalisme Indonesia berkembang. Kolonialisme jelas menghasilkan eksploitasi. Sistem tanam paksa, perkebunan, kerja paksa, pajak, diskriminasi hukum, dan ketimpangan sosial merupakan bagian dari struktur kolonial. Namun, kolonialisme juga menghasilkan sejumlah bentuk integrasi: pembangunan jaringan jalan dan kereta api; pelabuhan dan pelayaran antarpulau; administrasi kolonial; sistem pendidikan modern; pers dan percetakan; penggunaan bahasa Melayu/Indonesia sebagai bahasa komunikasi; pembentukan pasar antardaerah; mobilitas penduduk; pembentukan kelompok intelektual modern.

Semua itu tidak diciptakan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan awalnya adalah memperkuat pemerintahan kolonial. Namun, sejarah sering menghasilkan konsekuensi yang tidak direncanakan. Sekolah yang dimaksudkan untuk menghasilkan pegawai kolonial dapat menghasilkan nasionalis. Surat kabar yang awalnya merupakan bagian dari masyarakat modern kolonial dapat menjadi media propaganda anti-kolonial. Kereta api yang dibangun untuk mengangkut hasil perkebunan juga memudahkan pergerakan manusia. Bahasa yang dipakai untuk perdagangan dapat menjadi bahasa persatuan. Dengan demikian, nasionalisme Indonesia berkembang melalui pemanfaatan sekaligus penolakan terhadap struktur kolonial.

Pembentukan Indonesia sebagai bangsa tidak mungkin dipisahkan dari pemuda. Generasi muda awal abad ke-20 hidup dalam dunia yang berbeda dari generasi kerajaan tradisional. Mereka belajar di sekolah, membaca surat kabar, melakukan perjalanan, berorganisasi, dan berkomunikasi lintas daerah. Kongres Pemuda 1928 menjadi titik simbolik dari perubahan tersebut. Para pemuda menyadari bahwa perjuangan berdasarkan identitas daerah saja tidak cukup untuk membentuk negara merdeka.

Pemilihan bahasa Melayu yang dikembangkan menjadi bahasa Indonesia memiliki konsekuensi politik yang sangat besar. Bahasa tersebut relatif telah berfungsi sebagai *lingua franca* di kepulauan Nusantara sebelum masa kolonial. Dengan mengangkatnya menjadi bahasa persatuan, para pemuda menghindari dominasi satu bahasa etnis besar dan menciptakan simbol kesetaraan. Dokumen Sumpah Pemuda secara eksplisit menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Ini memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia dibangun bukan dengan menghapus

keragaman, melainkan dengan menciptakan identitas politik bersama di atas keragaman tersebut.

Dekolonisasi Asia: Proklamasi sebagai Puncak, Bukan Awal Tunggal

Proklamasi 17 Agustus 1945 sering disebut sebagai titik awal Indonesia merdeka. Secara hukum-politik, pernyataan tersebut memang sangat penting. Tetapi secara historis, proklamasi merupakan puncak dari proses panjang. Setidaknya terdapat beberapa lapisan yang mendahuluinya. Lapisan pertama adalah sejarah Nusantara. Hubungan antarpulau, perdagangan, kerajaan, dan kesultanan menciptakan warisan interaksi regional. Lapisan kedua adalah kolonialisme. Kolonialisme mengintegrasikan wilayah-wilayah yang kemudian menjadi Indonesia dalam satu struktur pemerintahan kolonial.

Lapisan ketiga adalah modernisasi. Pendidikan, percetakan, komunikasi, transportasi, dan organisasi modern menciptakan ruang politik baru. Lapisan keempat adalah nasionalisme. Identitas Indonesia berkembang melalui organisasi dan gerakan politik. Lapisan kelima adalah perubahan internasional. Perang dunia dan runtuhnya imperialisme Eropa menciptakan kesempatan. Lapisan keenam adalah tindakan politik. Para pemimpin dan pemuda Indonesia mengambil keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tanpa lapisan keenam, perubahan global mungkin hanya menghasilkan pergantian penguasa. Tanpa lapisan kelima, Proklamasi mungkin jauh lebih sulit dilakukan. Tanpa lapisan keempat, tidak ada bangsa politik yang siap mengklaim kemerdekaan.

Soekarno dan Mohammad Hatta merupakan dua figur sentral dalam proses transisi dari gerakan nasional ke negara. Soekarno mempunyai kemampuan mobilisasi massa dan artikulasi ideologi. Pidato-pidatonya berusaha menghubungkan nasionalisme dengan anti-imperialisme, persatuan, dan gagasan sosial. Hatta memiliki pengalaman organisasi internasional dan pendidikan ekonomi-politik. Ia lebih menekankan rasionalitas organisasi, demokrasi, ekonomi, dan diplomasi. Keduanya bukan satu-satunya aktor. Peran Sutan Sjahrir, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, Mohammad Yamin, Soepomo, Tan Malaka, para pemuda, ulama, tentara, buruh, petani, dan jutaan rakyat di berbagai daerah juga sangat penting. Sejarah kemerdekaan tidak boleh direduksi menjadi sejarah beberapa tokoh besar. Proklamasi memang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, tetapi keberhasilan mempertahankan negara melibatkan jaringan masyarakat yang sangat luas.

Selain itu, kemerdekaan Indonesia harus ditempatkan dalam konteks lebih luas, yaitu dekolonisasi Asia. India merdeka pada 1947. Burma dan Ceylon merdeka pada 1948. Filipina memperoleh kemerdekaan pada 1946. Negara-negara Asia lainnya kemudian menyusul. Jepang memang menjadi kekuatan agresor selama Perang Dunia II, tetapi kekalahan Jepang juga membuka ruang bagi masyarakat Asia untuk menantang kekuasaan kolonial Eropa.

Indonesia kemudian menjadi salah satu simbol penting dekolonisasi. Perjuangan Indonesia memperlihatkan bahwa bangsa terjajah dapat menggabungkan perjuangan bersenjata dan diplomasi internasional. Pengalaman tersebut kemudian berkontribusi

pada munculnya solidaritas Asia-Afrika. Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955, meskipun berada di luar periode pembentukan NKRI, merupakan kelanjutan logis dari pengalaman tersebut. Indonesia tidak hanya menjadi negara baru, tetapi kemudian berusaha menjadi salah satu suara negara-negara yang baru merdeka.

Kesimpulan

Sejarah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari sejarah perubahan dunia yang berlangsung selama lebih dari satu milenium. Indonesia tidak lahir di luar sejarah dunia, tetapi juga tidak semata-mata merupakan produk perubahan dunia. Perubahan dunia menciptakan struktur, tekanan, teknologi, gagasan, dan kesempatan dan bangsa Indonesia kemudian bertindak di dalam struktur tersebut untuk menentukan masa depannya. Hubungan antara runtuhnya Romawi dan lahirnya NKRI harus dipahami sebagai rantai transformasi sejarah, bukan hubungan sebab-akibat langsung.

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa negara tidak muncul secara tiba-tiba. Negara adalah hasil akumulasi pengalaman, konflik, gagasan, institusi, dan keputusan manusia. NKRI merupakan hasil dari proses panjang yang menghubungkan Nusantara dengan dunia, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan kemampuan masyarakat Indonesia mengubah pengalaman global menjadi proyek kebangsaan sendiri. Oleh sebab itu, sejarah pembentukan NKRI adalah bagian dari perubahan dunia dan Indonesia sekaligus merupakan aktor yang turut membentuk dunia.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict. 2006. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Revised Edition. London: Verso.
- Andaya, Barbara Watson dan Leonard Y. Andaya. 2015. *A History of Early Modern Southeast Asia, 1400–1830*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 2024. *Sebuah Catatan Jejak Perumusan Naskah Proklamasi dalam Arsip Privat Puisi Laksamana Muda Tadashi Maeda*. Jakarta: ANRI.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 2024. *Pameran Arsip Virtual HUT 75: Indonesia Maju*. Jakarta: ANRI.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 2024. *Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan*. Jakarta: ANRI.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 2025. *Guide Arsip Revolusi Indonesia 17 Agustus 1945–29 Desember 1949*. Jakarta: ANRI.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. *Inventaris Arsip Tekstual Sekretariat Negara Republik Indonesia 1945–1959*. Jakarta: ANRI.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. *Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa*. Jakarta: ANRI.
- Bastin, John dan Harry J. Benda. 1968. *A History of Modern Southeast Asia: Colonialism, Nationalism, and Decolonization*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

- Bayly, C. A. 2004. *The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons*. Oxford: Blackwell.
- Blackburn, Kevin. 2010. *The History of Indonesia*. Westport: Greenwood Press.
- Elson, R. E. 2008. *The Idea of Indonesia: A History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foulcher, Keith. 2008. *Sumpah Pemuda: Makna & Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu. Data bibliografis buku tercatat dalam katalog Perpustakaan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Library of Congress. *Environment, Trade and Society in Southeast Asia*. Washington, D.C.: Library of Congress.
- Library of Congress. *Portugal: A Country Study*. Washington, D.C.: Federal Research Division, Library of Congress.
- Library of Congress. *History of International Relations: A Non-European Perspective*. Washington, D.C.: Library of Congress.
- Lee, David. 1998. *Australia, Indonesia's Independence and the Transfer of Sovereignty, 1949*. Canberra: Commonwealth of Australia. Data bibliografis tercatat dalam katalog Perpustakaan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- McRikard, John. 2001. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Third Edition. Hampshire: Palgrave.
- Reid, Anthony. 1993. *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680. Volume One: The Lands Below the Winds*. New Haven: Yale University Press.
- Reid, Anthony. 1993. *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680. Volume Two: Expansion and Crisis*. New Haven: Yale University Press.
- Ricklefs, M. C. 2008. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Fourth Edition. Stanford: Stanford University Press.
- Taylor, Jean Gelman. 2003. *Indonesia: Peoples and Histories*. New Haven: Yale University Press.
- Tilly, Charles. 1990. *Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992*. Oxford: Blackwell.
- Wallerstein, Immanuel. 1974. *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York: Academic Press.
- Wertheim, W. F. 1956. *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. The Hague: W. van Hoeve.
- Wolters, O. W. 1999. *History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program.